

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN STUNTING DI DESA
KONTUMERE KECAMATAN KABAWO KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI
TENGGARA**

NUR HASRAT ILLAHI

NPP. 30.1362

Asdaf Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara

Program Studi Politik Indonesia Terapan Fakultas Politik Pemerintahan

Email : nurhasratillahi699@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Muhadam Labolo, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *This final report is entitled The Role of the Village Government in Handling Stunting in Kontumere Village, Kabawo District, Muna Regency, Southeast Sulawesi Province. Purpose:* *The purpose of this study was to find out how stunting was handled by the Kontumere Village Government, Kabawo District, Muna Regency, Southeast Sulawesi Province, the supporting and inhibiting factors for handling stunting. In this study using a descriptive qualitative method with an inductive approach. Method:* *Data collection methods used in this final report are observation, interviews and documentation. The data analysis techniques used in this study are data reduction, presenting data, and drawing conclusions. Result/Findings:* *Based on the results of the study, the handling of stunting in Kontumere Village, Kabawo District, Muna Regency, Southeast Sulawesi Province was not optimal. This can be seen from the stunting management program in Kontumere Village which has not been fully implemented. Conclusion:* *It can be seen that there are still inhibiting factors that influence this, including local beliefs and customs which are still held firmly so that they affect the nutritional intake of pregnant women and children, the large number of pregnant women who are at a young age with a low level of education, and a lack of concern for the environment so that environmental cleanliness is disturbed. The advice given from the results of this study, namely the need for wider socialization and communication regarding the handling of stunting to the whole community, as well as increasing cooperation between the government, both posyandu cadres, human development cadres and midwives in the village so that the stunting management program is implemented effectively optimal.*

Keywords: *The Role of the Village Government, Handling Stunting*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penanganan *stunting* di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan *stunting* oleh Pemerintah Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, faktor pendukung dan penghambat penanganan *stunting* tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. **Metode:** Metode pengumpulan data yang digunakan dalam laporan akhir ini adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mereduksi data, menyajikan data, dan melakukan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian bahwa penanganan *stunting* di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara belum optimal. **Kesimpulan:** Hal tersebut terlihat dari program penanganan *stunting* yang ada di Desa Kontumere yang belum sepenuhnya berjalan, dilihat masih adanya faktor penghambat yang mempengaruhi hal tersebut antara lain kepercayaan dan adat setempat yang masih dipegang teguh sehingga mempengaruhi asupan gizi ibu hamil dan anak, banyaknya ibu hamil yang berada pada usia muda dengan tingkat pendidikan rendah, dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan sehingga kebersihan lingkungan terganggu. Saran yang diberikan dari hasil penelitian ini, yaitu perlu adanya sosialisasi dan komunikasi yang lebih luas terkait penanganan *stunting* kepada seluruh masyarakat, serta meningkatkan kerjasama antara pemerintah, baik itu kader posyandu, kader pembangunan manusia dan bidan yang ada di desa tersebut agar terlaksananya program penanganan *stunting* secara optimal.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, Penanganan *Stunting*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur tetapi pembangunan berbicara tentang bagaimana membangun manusia atau pembangunan manusia. Pertumbuhan pribadi sama pentingnya dengan kemajuan fisik. Pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan landasan budaya dan intelektualitas bangsa. Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan nasional diselenggarakan dalam rangka membangun manusia dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Perbaikan pola asuh, ketersediaan makanan, dan rasa cukup dari pola makan seseorang merupakan langkah awal yang penting dalam proses pembangunan manusia yang diperlukan untuk meningkatkan nilai sumber daya manusia. Oleh karena itu, percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan Perpres /No. 72/2021 untuk mencapai kesehatan kecerdasan, dan produktivitas manusia, serta tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya peningkatan kualitas melalui koordinasi dan sinkronisasi pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan daerah serta instansi lainnya.

Pengembangan adalah proses meningkatkan sumber daya manusia. Pasti akan ada solusi jika kita berkomunikasi atau mendiskusikan pertumbuhan SDM. Salah satu fokus pembangunan manusia adalah pada peningkatan kualitas hidup bagi individu itu sendiri, membina lingkungan di mana orang merasa aman, menjunjung tinggi moral, dan merasa damai dengan diri mereka sendiri dan dunia. Sunarti (2012). Pada akhirnya, tujuan pertumbuhan di negara mana pun adalah untuk memperbaiki

kehidupan warganya. Agar sebuah negara berkembang pemerintah dan rakyatnya harus bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk kesejahteraan hidup.

Stunting adalah tinggi badan di bawah tingkat yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan; kondisi perkembangan masa kanak-kanak yang disebabkan oleh kelaparan terus-menerus dan penyakit berulang. Meskipun terjadi penurunan frekuensi dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,8% pada tahun 2018, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa 30,8% orang mengalami *stunting* pada tahun 2018.

Untuk memastikan bahwa *stunting* akhirnya diadopsi di Indonesia, pemerintah bahkan sekarang melanjutkan upayanya di bawah komando Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Target telah ditetapkan, dan jika tidak direalisasikan secara penuh ke depan, pemerintah akan terus bekerja keras untuk mencapai target tersebut, salah satunya adalah menurunkan angka *stunting* sebesar 14% pada tahun 2024. Tujuan dan sasaran yang diamanatkan pemerintah.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 diharapkan seluruh jajaran pemerintahan dapat memenuhi amanatnya dan bekerja sama untuk mempercepat proses pengurangan *stunting* pada penduduk. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang diketuai oleh Kepala BKKBN merupakan instansi pelaksana yang bertanggung jawab dalam pencegahan *stunting* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019 di 34 provinsi menemukan bahwa 27,67% anak Indonesia di bawah usia lima tahun mengalami *stunting* (Litha, 2020). Versi Organisasi Kesehatan Dunia memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara dengan status gizi rendah karena hal tersebut.

Stunting memanifestasikan dirinya dalam beberapa cara, termasuk anak muda yang kekurangan berat badan untuk usianya, tulangnya tidak berkembang dengan cepat, dan dia lebih pendek dari rekan-rekannya. Kekurangan dalam diet anak selama tahun pertama kehidupan adalah penyebab utama *stunting*. Dalam konteks ini, seribu hari dimulai pada saat pembuahan dan berlanjut hingga bayi berusia dua tahun. Jika ketersediaan nutrisi tidak mencukupi selama waktu ini, keterlibatan selanjutnya akan memiliki konsekuensi langsung dan jauh.

Kabupaten Muna menghadapi bahaya serius dari *stunting*. Jumlah total insiden yang dilaporkan meningkat. Penanganan *stunting* merupakan prioritas utama di Kabupaten Muna, salah satu dari seratus kabupaten dan kota tersebut. Target RPJMN angka prevalensi *stunting* pada 2020 adalah 26,92 %, namun pada 2019, angka prevalensi *stunting* masih berada pada 28%. Angka kejadian *stunting* pada anak masih tinggi di Kabupaten Muna. Tahun ini, jumlahnya sekitar 1.500 kasus peran pemerintah daerah, kecamatan, desa hingga OPD terkait sangat diperlukan. Penanganan *stunting* dimulai langsung dari tingkat desa bersama dengan puskesmas, posyandu dan di desa masing-masing. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi. Maka dari itu penelitian ini berjudul **“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN STUNTING DI DESA KONTUMERE KECAMATAN KABAWO KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA”**

1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)

PREVALENSI STUNTING PUSKESMAS KABAWO						
DESA	2019		2020		2021	
	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
BEA	10	20,83	4	8,70	4	11,76
BENTE	4	7,84	10	26,32	7	16,28
KAMBAWUNA	4	19,05	11	42,31	7	30,43
KASAKA	8	18,18	8	21,62	15	44,12
KONTUMERE	24	19,67	15	12,10	25	23,81
LAIMPI	14	14,00	29	27,10	15	25,42
LAMAEO	12	21,82	22	29,73	14	28,57
WANTIWORDO	19	19,6	34	25,56	30	32,97
RANGKA	11	34,4	11	37,93	11	40,74
KAWITE-WITE	10	10,5	BUKAN LAGI WILAYAH KERJA PKM KABAWO			
LAMANU	3	3,1				
PUSKESMAS	119	15,60	144	23,45	128	27,53

Berdasarkan data diatas prevalensi stunting di Desa Kontumere dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 belum mengalami penurunan dimana hal tersebut disebabkan oleh faktor multidimensi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlunya mengatasi stunting berkontribusi terhadap praktik gizi buruk termasuk tidak mengedukasi ibu tentang kesehatan dan gizi, lingkungan, sanitasi, dan penggunaan air sebelum dan selama kehamilan dan persalinan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama yang dilakukan oleh Hayati Sofia (2021) menyimpulkan, bahwa strategi dari BKKBN di dalamnya ada Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Sangihe, dalam kegiatannya yakni sebagai Pencegahan Stunting sudah begitu baik, namun ada beberapa strategi program yang di jalankan belum sepenuhnya efektif, dinas PP & KB adalah salah satu Dinas yang mengatur tentang kesejahteraan keluarga Indonesia, dalam hal ini kesehatan anak dan ibu dalam sebuah keluarga sangatlah penting untuk di lakukan apalagi saat ini dengan adanya isu Nasional tentang Percepatan Penurunan Stunting yang di keluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 menjadi sebuah acuan untuk bertindak serta menjalankan strategi.

Kedua, yang dilakukan oleh Ririn Novianti (2020) menyimpulkan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengatasi masalah stunting menurut Camat Kecamatan Undaan, Rifai Nawawi dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan posyandu di Desa Medini pada tanggal 10 Januari 2020 menyatakan bahwa tingginya angka stunting di Kecamatan Undaan akan diatasi dengan pengoptimalan peran posyandu yang akan di galakan ke seluruh desa terutama desa dengan jumlah angka stunting yang tinggi.

Ketiga, yang dilakukan Hafzana Bedasari (2021) menyimpulkan Strategi Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan penanganan stunting (studi kasus di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun) dianalisis menggunakan teori David dengan permasalahan masih terdapat balita stunting di Desa Pongkar dan program pencegahan dan penangan stunting belum berjalan dengan maksimal. Dalam penelitian ini menggunakan Teori David dengan indikator perumusan strategi, implementasi startegi dan evaluasi strategi.

1.4 Pernyataan Kabaruan Ilmiah

Dalam skripsi ini fokus penelitian yang diambil penulis yang berfokus pada bagaimana peran pemerintah desa dalam penanganan stunting dimana terdapat kerja sama antara pemerintah desa dan pihak puskesmas kecamatan serta kader pembangunan masyarakat dalam melaksanakan program penanganan stunting ditambah lagi bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat penanganan stunting.

1.5 Tujuan

Dalam penelitian dan penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah penanganan *stunting* oleh Pemerintah Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dan untuk mengetahui dan menganalisis apa sajakah faktor pendukung dan penghambat penanganan *stunting* di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara.

II. METODE

Pelaksanaan penelitian ini menitikberatkan pada kegiatan pemerintah yakni membangun sumber daya manusia dengan pemenuhan gizi untuk menekan tingkat pertumbuhan *stunting*. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini diperlukan suatu metode penelitian untuk mempermudah menjawab tujuan penelitian sehingga pelaksanaan kegiatan penelitian dapat terwujud dengan lancar dan terarah. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis dimana pengumpulan data berdasarkan teori Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:247) dalam bukunya metodologi penelitian kualitatif. Sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Muna terletak di jazirah sulawesi bagian tenggara, meliputi bagian utara pulau muna, serta pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitar kawasan tersebut, Secara astronomis, Kabupaten Muna terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 4015' – 5015' Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 122030' – 123015' Bujur Timur. Kabupaten Muna adalah salah satu Daerah Tingkat II atau kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, dengan Ibu kota di Raha. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.057,69 km² atau ± 205.769 ha. dan berpenduduk sebanyak 223.991 jiwa.

Kabupaten Muna terdiri dari 22 kecamatan, 26 kelurahan dan 125 desa dengan luas wilayah 1.922,16 km² dan jumlah penduduk sebesar 227.941 jiwa (2017) dengan sebaran penduduk 118 jiwa/km². Kabupaten Muna memiliki 22 Kecamatan dengan luas kecamatan yang berbeda-beda diantaranya Kecamatan Batalaiworu, Kecamatan Batukara, Kecamatan Bone, Kecamatan Duruka, Kecamatan Kabangka, Kecamatan Kabawo, Kecamatan Katobu, Kecamatan Kontukowuna, Kecamatan Kontunaga, Kecamatan Lasalepa, Kecamatan Lohia, Kecamatan Maligano, Kecamatan Marobo, Kecamatan Napabalano, Kecamatan Parigi, Kecamatan Pasi Kolaga, Kecamatan Pasiri Putih, Kecamatan Tongkuno, Kecamatan Tongkuno Selatan, Kecamatan Towea, Kecamatan Wakorumba Selatan, dan Kecamatan Watopute.

1. Penanganan Stunting

Permasalahan utama dari *stunting* sebenarnya adalah masalah gizi buruk kronik yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang sejak masa kehamilan hingga 1.000 hari kehidupan pertama sehingga menyebabkan pertumbuhan fisik anak lebih pendek daripada anak seusianya yang juga berdampak pada pertumbuhan jaringan otak yang akhirnya mempengaruhi kualitas sumber daya saat dewasa nantinya. Itulah mengapa *stunting* dapat mempengaruhi pendapatan suatu negara, karena semakin banyak anak terkena *stunting* maka akan semakin banyak pula kerugian dalam bentuk sumberdaya manusia yang berkualitas baik secara intelektual maupun fisik. Angka *stunting* di Provinsi Sulawesi Tenggara masih cukup tinggi, ini terbukti bahwa dari 100 kabupaten/kota yang menjadi prioritas penanganan *stunting* terdapat 16 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara yang menjadi target prioritas penanganan *stunting*. Agung, I.G.A.A. (2012).

Kabupaten Muna adalah 1 dari 100 kabupaten/kota yang menjadi prioritas penanganan *stunting*. Desa Kontumere yang merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Muna juga tidak luput dari perhatian pemerintah dalam kaitannya penekanan angka *stunting*. Permasalahan kesehatan anak memang menjadi tanggung jawab dari orang tua masing-masing namun tanpa disadari lingkungan juga berperan penting terhadap tumbuh kembang anak. Dalam hal ini Pemerintah Desa Kontumere memiliki andil sebagai penyelenggara pemerintahan di desa yang berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap warganya mendapat fasilitas dan pelayanan dasar khususnya pelayanan kesehatan dasar yang memadai. Pelayanan kesehatan dasar tidak hanya dibebankan kepada pihak puskesmas selaku lembaga yang bergerak pada bidang kesehatan. Pemerintah desa merupakan pelaku utama dari penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

Penanganan *stunting* merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan berkewajiban memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelayanan yang diselenggarakan pemerintah. Berkaitan dengan *stunting*, Pemerintah Desa Kontumere selaku penyelenggara pemerintahan desa bertanggung jawab dalam pelayanan publik secara langsung, khususnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Desa Kontumere.

Selama kegiatan penelitian ini peneliti menggunakan pisau analisis *The New Public Service* (NPS) milik Denhardt & Denhardt. *The New Public Service* (NPS) merupakan pendekatan yang menurut peneliti paling tepat dalam menangani masalah pelayanan publik di era globalisasi saat ini. Diketahui bahwa pemerintah berperan sebagai pelayan publik yang artinya pemerintah hadir untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Berdasarkan teori milik Denhardt & Denhardt (2007), diketahui terdapat tujuh (7) prinsip yang harus dipenuhi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan (Denhardt & Denhardt, 2007)

1. *Serve Citizens, Not Customers*
2. *Seek the Public Interest*
3. *Value Citizenship over Entrepreneurship*
4. *Think Strategically, Act Democratically*
5. *Recognize that Accountability Isn't Simple*
6. *Serve Rather than Steer*
7. *Value People, Not Just Productivity*

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penanganan Stunting di Desa Kontumere

Selama penulis melaksanakan penelitian, penulis memperoleh data dan melihat langsung gejala-gejala yang terjadi di lokasi. Penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan program penanganan *stunting* di Desa Kontumere terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan penanganan *stunting*.

a. Faktor Pendukung

1. Letak Geografis

Desa Kontumere yang berada pada dataran rendah dan memiliki akses jalan yang baik merupakan faktor pendukung yang memudahkan pemerintah desa melaksanakan pelayanan publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan *stunting*. Keuntungan yang dirasakan baik oleh Pemerintah Desa selaku penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat selaku pengguna layanan publik ialah penyusunan dan pengumpulan data *stunting* yang dengan mudah dan cepat dapat dilakukan. Letak geografis juga memudahkan koordinasi dan kerjasama pemerintah Desa dengan OPD lain sehingga pelaksanaan Program Penanganan *Stunting* dapat lebih optimal. Hal ini tentunya akan memudahkan Pemerintah Desa Kontumere untuk mencapai indikator pelayanan publik yang baik sesuai *The New Public Service* oleh Denhardt & Denhardt yaitu *think strategically act democratically* yang artinya Pemerintah Desa Kontumere mampu memikirkan strategi yang tepat dalam kaitannya mengentaskan *stunting* di Desa Kontumere namun tetap bersikap terbuka kepada semua program yang dilaksanakan, masyarakat atas mengingat lokasi Desa Kontumere yang memiliki akses mudah antar warganya maka itu tidak menjadi hambatan bagi Pemerintah Desa untuk menarik pendapat dan menyebarkan informasi kepada masyarakat Desa Kontumere.

2. Masyarakat Yang Mulai Sadar Gizi Terutama Ibu Hamil dan Anak

Peran masyarakat langsung dalam program penanganan *stunting* merupakan kunci penting dari keberhasilan program itu sendiri. Utamanya kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi dan menjaga kebersihan lingkungan. Peran pemerintah desa terbatas pada pemberian pengetahuan kesehatan kepada masyarakat desa sehingga masyarakat desa dapat menyadari dengan sendirinya. Dibanding mengarahkan masyarakat desa untuk melaksanakan program penanganan *stunting*, pemerintah Desa Kontumere diharapkan untuk memberi pelayanan publik terkait penanganan *stunting*, sesuai dengan salah satu indikator NPS yaitu *Serve rather than steering*. Contohnya pemerintah desa menyelenggarakan kelas ibu hamil dan gizi kepada masyarakat desa sehingga masyarakat memahami dengan sendirinya pentingnya menjaga kesehatan gizi ibu hamil dan balita.

b. Faktor Penghambat

1. Kepercayaan dan Adat Setempat

Sebagian besar masyarakat desa tentunya masih memegang kepercayaan dan adat setempat. Bagaimanapun hal tersebut tidak dapat ditinggalkan karena hal tersebut berkaitan dengan norma yang berlaku. Meskipun adat dan kepercayaan tersebut tidak lagi dipegang oleh semua masyarakat namun tetap saja hal tersebut mempengaruhi pelaksanaan program penanganan *stunting* baik secara langsung maupun tidak. Kepercayaan yang mempengaruhi tindakan dan sikap ibu hamil maupun keluarga terkait akhirnya berdampak pada kesehatan ibu hamil dan anaknya kemudian. Tentunya hal tersebut menjadi penghambat bagi pelaksanaan program penanganan *stunting*. Dalam NPS salah satu indikator bahwa pemerintah telah menjadi pelayan publik yang baik adalah *Value people, not just productivity* yang artinya dalam melaksanakan program pemerintah Desa Kontumere tidak hanya melihat produktivitas atau keberhasilan programnya saja namun juga bagaimana pemerintah Desa Kontumere tetap menghargai warga desanya beserta adat dan kepercayaan yang masih melekat, walaupun adat dan kepercayaan yang ada bertentangan dengan program yang dijalankan Pemerintah Desa Kontumere. Tentunya hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan program penanganan *stunting*. Disatu sisi program harus berhasil untuk memperbaiki kehidupan masyarakat namun disisi lain pelaksanaan program dapat mempengaruhi tatanan sosial yang terbentuk di lingkungan Desa Kontumere.

2. Banyaknya Ibu Hamil Yang Berada Pada Usia Muda Dengan Tingkat Pendidikan Rendah.

Pada daerah pedesaan, menikah pada usia muda merupakan hal yang wajar terutrama jika hal tersebut berkaitan dengan kepercayaan dan adat yang dipercaya. Namun sangat disayangkan bahwa tanpa disadari hal tersebut justru menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak terlahir dalam kondisi *stunting*, terutama jika si ibu memiliki tingkat pendidikan rendah. Salah satu upaya pemerintah desa adalah hadir sebagai pelayan masyarakat yang memberikan informasi terkait *stunting* dan gizi ibu hamil dan anak. *Serve rather than steering* yang merupakan indikator dari NPS dalam pelaksanaannya mengalami hambatan karena dalam kondisi masyarakat yang enggan menerima saran dari pemerintah meskipun untuk kebaikan bersama sehingga terkadang pemerintah berbalik arah menjadi pengontrol bagi masyarakatnya. Hal ini tentunya menjadi hambatan bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik yang baik, sehingga selain kecakapan pemerintah desa juga dibutuhkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

3. Kurangnya Kepedulian Terhadap Lingkungan

Seperti masyarakat yang masih mencuci pakaian dan mandi disungai, membuat tempat sampah yang masih berada dalam lingkungan rumah dan berjarak dekat dengan rumah warga, serta kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah di sungai. Sebelumnya telah disebutkan bahwa kebersihan lingkungan merupakan faktor yang memberi pengaruh kelangsungan hidup satu sama lain yang dapat berakibat pada kesehatan setiap warganya. Selama melaksanakan penelitian, penulis menemukan bahwa meskipun lingkungan Desa Kontumere tergolong bersih namun masih ditemukan beberapa lingkungan yang tidak begitu memperhatikan kesehatan lingkungannya sehingga mempengaruhi tetangga sekitarnya.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Stunting pada anak memang harus menjadi perhatian dan diwaspadai. Kondisi ini dapat menandakan bahwa nutrisi anak tidak terpenuhi dengan baik. Jika dibiarkan tanpa penanganan, stunting bisa menimbulkan dampak jangka panjang kepada anak. Anak tidak hanya mengalami hambatan pertumbuhan fisik, tapi nutrisi yang tidak mencukupi juga memengaruhi kekuatan daya tahan tubuh hingga perkembangan otak anak. Seperti yang dikemukakan oleh peneliti sebelumnya Kaitannya penanganan dengan upaya pemerintah dalam menyikapi permasalahan yang timbul di masyarakat yaitu sikap yang diambil oleh pemerintah harus mampu mengatasi atau mengontrol suatu permasalahan yang ada. Maka, penanganan yang dilakukan pemerintah dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memecahkan permasalahan yang sedang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Penanganan tersebut dapat berupa pelayanan pemerintah terhadap kebutuhan publik atau peningkatan pelayanan publik yang lebih baik.

Melakukan sosialisasi gizi dan stunting berarti pemerintah Desa Kontumere berusaha membukakan wawasan masyarakat desa dengan melihat pentingnya menjaga kesehatan dan asupan gizi sehingga masyarakat akan memiliki kesadaran diri untuk menjaga kesehatan dan asupan gizinya sendiri. Melalui sosialisasi ini berarti pemerintah menyediakan informasi tentang stunting dan gizi kepada masyarakat Desa Kontumere, dengan begitu masyarakat desa akan memahami pentingnya menjaga kesehatan dan asupan gizi. Pemerintah desa hadir untuk melayani kebutuhan masyarakat tidak hanya mengarahkan masyarakat desa untuk melaksanakan program pemerintah semata, menghadirkan Puskesmas Kabawo dan Kader Pembangunan Masyarakat sebagai narasumber untuk sosialisasi Gizi dan Stunting, merupakan pelayanan yang dilakukan untuk menangani masalah stunting yang sedang dihadapi. Jadi bentuk pelayanan pemerintah tidak hanya sebatas pada pelayanan administrasi atau membangun sarana fisik saja, menyediakan informasi dan akses pada informasi juga merupakan bentuk pelayanan.

Stunting tidak hanya bisa ditangani oleh pihak keluarga saja atau pemerintah saja. Diperlukan dukungan dan kerjasama dari semua pihak agar stunting dapat teratasi dengan baik. Namun perlu diingat bahwa dalam proses penanganan stunting tentunya pemerintah maupun masyarakat akan selalu bersinggungan, untuk itu diperlukan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya bersama menangani stunting. Perlu diperhatikan, bahwa permasalahan

yang dihadapi tidak hanya tentang stunting, setelah stunting selesai dapat dipastikan sudah banyak permasalahan yang menunggu untuk diselesaikan, tentunya akan kembali mempertemukan pemerintah dan masyarakat, untuk itu baik pemerintah maupun masyarakat perlu untuk menjaga hubungan yang baik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka ditarik kesimpulan Penanganan *stunting* di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara belum optimal. Hal tersebut terlihat dari program penanganan *stunting* yang ada di Desa Kontumere yang belum sepenuhnya berjalan. Program penanganan *stunting* yang dimaksud berdasarkan Peraturan Bupati Muna Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Desa: pelayanan kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, sanitasi dan air bersih jamban, perlindungan sosial dan pendidikan anak usia dini. Pelaksanaan 5 (lima) aksi konvergensi pencegahan *stunting* belum seluruhnya terlaksana, di antaranya masih belum adanya konseling gizi terpadu, sanitasi dan air bersih dan perlindungan sosial. Selain itu 5 (lima) dari 7 (tujuh) indikator *The New Public Service* (NPS) oleh Denhardt & Dendhardt yang dijadikan pisau analisis penelitian oleh penulis tidak semuanya berjalan optimal. Kelima indikator tersebut sudah ditemukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Desa Kontumere, namun tidak semua program yang dilaksanakan menggambarkan pelaksanaan yang optimal jika dinilai dari kelima indikator tersebut.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian yakni waktu pada saat pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan di Desa Kontumere dan hanya diberi waktu selama 15 hari kerja.

Arah masa depan penelitian (future work): Harapan penulis selanjutnya jika kembali mengangkat judul tentang Peran Pemerintah Desa dalam penanganan stunting adalah mengajak masyarakat untuk lebih peka terhadap kesehatan serta asupan gizi yang harus dipenuhi selama 1000 HPK dan bagaimana menangani serta ikut serta dalam program penanganan stunting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Muna terutama Kecamatan Kabawo Desa Kontumere beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta yang membantu dan mensukseskan penelitian, serta pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hayati Sofia, 2021. Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Stunting Di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Studi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sangihe)
- Ririn Novianti, 2020. Peran Posyandu Untuk Menangani Stunting Di Desa Medini Kecamatan Undaan
- Hafzana Bedasari, 2021. Strategi Dinas Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting (Studi Kasus Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun)
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Agung, I.G.A.A. 2012. Pengaruh Perbaikan Gizi Kesehatan Terhadap Produktivitas Kerja. Fakultas MIPA Universitas Hindu Indonesia

